



# “Kita perlu menyingkapkan isu-isu pekerja rumahan”

**Francisco Bangun**

Kepala Bidang  
Perlindungan dan  
Ketenagakerjaan,  
Dinas Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi Provinsi  
Sumatera Utara



“  
*Pekerjaan rumahan adalah di sektor informal. Jika pemerintah daerah dapat mengeluarkan sebuah peraturan terkait dengan perekonomian informal, pekerjaan rumahan dapat dan harus dimasukkan.*  
”

Bapak Bangun adalah salah satu dari 22 peserta anjang karya (*study tour*) ke Self-Employed Women’s Association (SEWA), sebuah organisasi berbasis keanggotaan, di Ahmedabad, India, yang diselenggarakan oleh Proyek MAMPU ILO bekerjasama dengan SEWA dari tanggal 16 hingga 25 September 2014. MAMPU ILO adalah proyek yang bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan ke ketenagakerjaan dan pekerjaan layak di Indonesia, yang didanai oleh Pemerintah Australia.

Bapak Bangun terinspirasi dan terkesan oleh SEWA, yang membawa banyak perubahan positif pada kehidupan para pekerja mandiri dan pekerja rumahan perempuan sebagai hasil dari advokasi strategis selama 4 dekade terakhir. Organisasi ini sekarang memiliki hampir 2 juta anggota dan menyediakan hubungan dan layanan kepada anggotanya pada pelatihan keterampilan, perumahan, asuransi, radio, jurnal ilmiah dan jaringan global, dan lain sebagainya. Organisasi ini juga menawarkan bantuan hukum kepada anggotanya yang menghadapi masalah hukum dalam pekerjaan mereka.

Bapak Bangun menyadari bahwa pekerja rumahan di Indonesia yang belum diakui, tersebar dan tidak terorganisir, kontras dengan apa yang dilihatnya di India. Menurut pendapatnya, membuat pekerja rumahan terorganisir akan membawa keuntungan yang kuat dalam mengakui keberadaan mereka dan mengadvokasi hak-hak mereka sebagai pekerja. Namun, yang paling utama adalah untuk menyingkapkan pekerja rumahan dan isu-isu pekerja rumahan. **“Sejujurnya, isu pekerja rumahan saat ini tidak menjadi prioritas (pemerintah), tetapi (melihat kondisi**

1 Konvensi ILO tentang Pekerjaan Rumahan, 1996, No. 177, mendefinisikan pekerja rumahan sebagai: “seseorang yang mengerjakan pekerjaan di dalam rumahnya atau di tempat lain pilihannya, selain tempat kerja pemberi kerja; untuk mendapatkan upah yang menghasilkan suatu produk atau jasa sebagaimana yang ditetapkan oleh pemberi kerja, terlepas dari siapa yang menyediakan peralatan, bahan atau input lain yang digunakan”.



*kerja mereka) kita perlu 'menyebarkan' isu-isu tersebut. Kita benar-benar perlu memberikan informasi kepada masyarakat tentang hal ini,"* tegas Bapak Bangun.



Bapak Bangun baru mengkaji keberadaan pekerja rumahan setelah diperkenalkan dan terlibat dalam Proyek ILO-MAMPU pada 2013. Pekerja rumahan adalah pekerja yang tidak tentu, rentan dan terpinggirkan. Definisi pekerja rumahan dalam Konvensi ILO No. 177<sup>1</sup> mencakup tiga unsur umum sebuah hubungan kerja berdasarkan UU ketenagakerjaan Indonesia: pekerjaan yang ditetapkan, pengupahan dan tingkat subordinasi. Namun, pekerja rumahan tidak diakui atau secara eksplisit didefinisikan oleh undang-undang atau peraturan nasional, membuat mereka tidak memiliki perlindungan hukum dan sosial di Indonesia.

Dia menyatakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Utara memiliki komitmen untuk mengakui dan melindungi pekerja rumah dengan menyusun peraturan daerah, yang akan memakan waktu sekitar 3 tahun hingga 2018. Walau belum ada payung undang-undang nasional untuk pekerja rumahan, dia menyadari bahwa menyusun peraturan daerah itu memungkinkan. ***"Ambil contoh Peraturan Daerah No.5/2004 Provinsi Sumatera Utara yang mengakui bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dan melarang praktek tersebut. Kami mengeluarkan***

***ini beberapa tahun sebelum undang-undang nasional, dengan bantuan teknis dan dukungan dari ILO."***

Bapak Bangun melanjutkan dengan bagaimana menyusun sebuah peraturan daerah untuk pekerja rumahan dapat dicapai.

***"Pekerjaan rumahan adalah di sektor informal. Jika pemerintah daerah dapat mengeluarkan sebuah peraturan terkait dengan perekonomian informal, pekerjaan rumahan dapat dan harus dimasukkan. Ini terlihat lebih memungkinkan. Provinsi Aceh, misalnya, memiliki sebuah peraturan daerah untuk sektor informal,"*** jelasnya. Lebih lanjut dia menyatakan, ***"Kita memerlukan data tentang pekerja rumahan dan isu-isu pekerja rumahan. Kita meramalkan bahwa pengumpulan data akan menjadi fokus pada tahun 2015. Kemudian kita membawa data ini ke parlemen sebagai dasar kita. Kita juga memerlukan keahlian dan bantuan teknis ILO selama proses tersebut, sebagaimana halnya yang terjadi dengan peraturan pekerja anak"***

Bapak Bangun menutup kesaksiannya dengan mengungkapkan bahwa banyak kendala yang harus diantisipasi, tetapi menekankan bahwa pekerja rumahan akan diakui jika pemerintah, pengusaha, pekerja dan pemangku kepentingan lainnya berkomitmen. 🌟

Didokumentasikan oleh  
Hirania Wiryasti dan Novita Hendrina

Proyek ILO-MAMPU  
Medan, Sumatera Utara,  
Desember 2014



# “Kita harus membuat peraturan daerah untuk melindungi pekerja rumahan”

“

*Tantangan utama dalam menyusun peraturan di tingkat daerah adalah tidak adanya undang-undang nasional yang secara eksplisit mengatur pekerja rumahan.*

”



**Totok Nurhandajanto, SH, MM**

*Kepala Bidang Hubungan Industrial, Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur*

Bapak Nurhandajanto, Kepala Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, merupakan salah satu dari 22 peserta yang berpartisipasi dalam anjang karya (*study tour*) ke Self-Employed Women’s Association (SEWA), sebuah organisasi berbasis keanggotaan, di Ahmedabad, India. Study tour tersebut diselenggarakan oleh Proyek MAMPU ILO bekerjasama dengan SEWA dari tanggal 16 hingga 25 September 2014. MAMPU ILO adalah sebuah proyek yang bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan ke ketenagakerjaan dan pekerjaan layak, yang didanai oleh Pemerintah Australia.

Selama *study tour*, Bapak Nurhandajanto sangat terkesan dengan prestasi SEWA yang berawal dengan para relawan untuk menjangkau dan mengorganisir pekerja rumahan perempuan 4 dekade yang lalu, dan sekarang memiliki hampir 2 juta anggota di beberapa provinsi di India.

Bapak Nurhandajanto mengakui kondisi yang sama antara India dan Indonesia berkaitan dengan pekerja rumahan, di mana mereka menghadapi berbagai tantangan termasuk upah rendah, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja

yang terbatas, jaminan sosial yang terbatas dan jam kerja yang panjang. SEWA mengorganisir pekerja rumahan, menghubungkan mereka dengan program perlindungan dan kesejahteraan sosial pemerintah, dan mengadvokasi hak-hak mereka sebagai pekerja kepada pemerintah. Mengkaji semua tantangan dan prestasi SEWA selama 40 tahun terakhir ini, Bapak Nurhandajanto berjanji pada dirinya sendiri untuk memanfaatkan kapasitasnya sebagai pegawai negeri sipil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah pekerja rumahan, khususnya di Provinsi Jawa Timur.

Pekerja rumahan adalah pekerja yang tidak tentu, rentan dan terpinggirkan. Definisi pekerja rumahan dalam Konvensi ILO No. 177<sup>1</sup> mencakup tiga unsur umum sebuah hubungan kerja berdasarkan UU ketenagakerjaan Indonesia: pekerjaan yang ditetapkan, pengupahan dan tingkat subordinasi.

1 Konvensi ILO tentang Pekerjaan Rumahan, 1996, No. 177, mendefinisikan pekerja rumahan sebagai: “seseorang yang mengerjakan pekerjaan di dalam rumahnya atau di tempat lain pilihannya, selain tempat kerja pemberi kerja; untuk mendapatkan upah yang menghasilkan suatu produk atau jasa sebagaimana yang ditetapkan oleh pemberi kerja, terlepas dari siapa yang menyediakan peralatan, bahan atau input lain yang digunakan”.



Namun, pekerja rumahan tidak diakui atau secara eksplisit didefinisikan oleh undang-undang atau peraturan nasional, membuat mereka tidak memiliki perlindungan hukum dan sosial di Indonesia.

***“Sebelum saya terlibat dalam Proyek MAMPU ILO, saya tidak menyadari keberadaan pekerja rumahan. Terlibat dalam Proyek dan berpartisipasi dalam study tour, saya belajar tentang pekerja rumahan dan kondisi kerja mereka, dan juga apa yang bisa kita lakukan untuk mengakui mereka sebagai pekerja melalui peraturan,”*** kata Bapak Nurhandajanto.

Selain menjadi Kepala Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja, Bapak Nurhandajanto adalah Ketua Komite Lembaga Kerja Sama (LKS) mekanisme Tripartit (pemerintah, pengusaha dan pekerja) di Provinsi Jawa Timur. Menyadari pentingnya penyusunan peraturan untuk mengakui dan melindungi pekerja rumahan, dia memanfaatkan Lembaga Kerjasama untuk menyelenggarakan diskusi tentang perlunya melindungi pekerja

rumahan dengan juga melibatkan LSM lokal terkait yang mendukung pekerja rumahan. Bapak Nurhandajanto menyampaikan bahwa Lembaga belum mencapai kesepakatan tentang perlunya peraturan, dan menjelaskan, ***“Tantangan utama dalam menyusun peraturan di tingkat daerah adalah tidak adanya undang-undang nasional yang secara eksplisit mengatur pekerja rumahan.”*** Di sisi lain, dia menyaksikan kasus-kasus di mana peraturan daerah disusun tanpa adanya undang-undang nasional. ***“Ini sangat tergantung pada komitmen pemerintah dan legislatif guna untuk menanggapi kondisi sosial. Belajar dari India, saya khawatir bahwa pekerjaan rumahan menjadi semakin lazim di Indonesia. Jumlah pekerja rumahan mungkin meningkat tetapi mereka tidak terlihat dan tidak terlindungi. Kita berharap Jawa Timur bisa memprakarsai peraturan meskipun tidak akan mudah. Tetapi jika kita mulai dari langkah-langkah kecil, saya yakin kita akan melihat beberapa perubahan,”*** pungkasnya. 🌸

Didokumentasikan oleh  
Lilis Suryani

Proyek ILO-MAMPU  
Surabaya, Jawa Timur,  
Desember 2014





# Memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman untuk kerja yang lebih baik

*Sebuah kisah dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta*



Ibu Siti Zamzanah (58) tinggal di kelurahan Notoprajan, Ngampilan, kota Yogyakarta bersama dua anaknya yang sudah dewasa, seorang menantu dan dua cucu di sebuah rumah miliknya setelah suaminya meninggal pada tahun 2002. Setelah lulus dari SMA pada pertengahan tahun 70-an, dia mulai bekerja berbagai jenis pekerjaan. Pada saat dia bertemu dengan suaminya di akhir 70-an, dia sudah berpengalaman dengan pekerjaan paruh waktu dan penuh waktu, formal dan informal, sebagian besar di industri garmen. Dia terus bekerja penuh waktu di sebuah rumah jahit/mode setelah menikah, tetapi ketika anak bungsu mereka beranjak remaja, suatu waktu pada tahun 1998, dia merasa perlu memberikan lebih banyak waktu dan perhatian untuk keluarganya. Dia meninggalkan pekerjaan penuh waktunya dan mengambil pekerjaan rumahan membuat lubang kancing pada pakaian dan menjahit kancing. Sebagai langkah pertama, Ibu Zamzanah meminjam uang dari koperasi setempat untuk membeli mesin jahit dan bahan (benang, jarum, dll.). Dia kemudian berhubungan dengan perantara yang dikenalnya dari sesama pekerja rumahan dan pekerjaan penuh waktu terakhirnya.

“  
*Saya senang belajar topik-topik baru melalui kelompok ini, misalnya tentang jender, hak asasi manusia dan kualitas kerja.*  
”

Ibu Zamzanah telah membuat lubang kancing dan menjahit kancing selama 16 tahun. Dia biasanya menikmati hidupnya – menghabiskan waktu dengan keluarga dan bekerja dari rumah – tetapi dia tidak sepenuhnya puas dengan pekerjaannya. Dia dibayar Rp. 200 (USD 1.8 sen) per lubang kancing dan Rp. 450 (USD 4 sen) per lubang kancing & memasang kancing. Dia mampu menghasilkan sekitar Rp. 1.000.000 (USD 90) dalam satu bulan, yang harus dialokasikannya untuk membeli lebih banyak bahan jahit dan membayar listrik dan perawatan mesin jahitnya. Anak-anaknya dan menantunya memiliki pekerjaan berbeda-beda, tetapi juga di sektor informal dan secara paruh



waktu. Gabungan pendapatan mereka hanya cukup untuk keluarga untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Mereka tidak mampu membayar program-program perlindungan sosial seperti Jamkesmas dan BPJS, tetapi mereka tidak dianggap sebagai "miskin" oleh pemerintah, yang, jika tidak, akan memberi mereka jaminan secara gratis.

Pada tahun 2008, Ibu Zamzanah bergabung dengan kelompok pekerja rumahan yang diorganisir oleh Yasanti, sebuah LSM lokal yang bekerja di DI.Yogyakarta dan Jawa Tengah dan merupakan salah satu Mitra Pelaksana Proyek ILO/MAMPU – Akses ke Ketenagakerjaan dan Pekerjaan Layak untuk Perempuan yang didanai oleh Pemerintah Australia. Sejak saat itu, dia terlibat aktif dalam diskusi dan kegiatan kelompok.

***"Saya senang belajar topik-topik baru melalui kelompok ini, misalnya tentang jender, hak asasi manusia dan kualitas kerja,"*** katanya. Dia, misalnya, memanfaatkan pengetahuannya untuk meningkatkan kualitas produknya. ***"Sebelumnya, saya mengukur jarak antara dua lubang kancing dengan menggunakan jemari saya atau hanya membuat perkiraan. Setelah saya belajar tentang kualitas kerja, saya mengerti bahwa saya harus memberikan produk berkualitas baik. Sejak itu, saya membeli pita ukur dan pensil; dan mengukur jarak dengan sentimeter. Jarak antara dua lubang sekarang seragam."***

Ibu Zamzanah menyampaikan bahwa belum pernah sekalipun perantaranya menawarkan kenaikan upah. Dalam 16 tahun mengerjakan pekerjaan yang sama, harga lubang dan kancingnya



naik pelan dari Rp. 150 (1.4 sen) menjadi Rp. 450. Kenaikan ini mungkin hanya karena dia memintanya. Dia menekankan bahwa dia selalu mendukung permintaannya atas kenaikan upah dengan fakta-fakta kenaikan harga bahan atau listrik. Ibu Zamzanah mempelajari ini sendiri, jauh sebelum dia bergabung dengan kelompok Yasanti. Sekarang, dia senang berbagi pendekatannya dengan anggota lain kelompok tersebut. ***"Saya senang bahwa kita semua dapat berbagi pengalaman masing-masing dan saling mendukung dalam kelompok ini. Dengan begitu, mudah-mudahan kita semua dapat memiliki kondisi kerja yang lebih baik."*** 🌟

Didokumentasikan oleh  
Hirania Wiryasti

Proyek ILO-MAMPU  
Kota Yogyakarta, DIY,  
Oktober 2014





# “Saya ingin pekerja rumahan diakui sebagai pekerja”

*Sebuah kisah dari Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah*

Ibu Ida Fitriany telah belajar banyak tentang isu-isu pekerja rumahan sejak mengikuti program Yasanti dengan Proyek MAMPU ILO. Dia sekarang tahu bahwa pekerja rumahan adalah pekerja dan memiliki hak sebagaimana pekerja lain dan dia ingin terus menyuarkan hak-hak ini.

Ibu Fitriani (47 tahun) tinggal di sebuah desa di Ungaran, Kabupaten Semarang bersama suami dan dua anak berusia 12 (perempuan) dan 15 (laki-laki). Suaminya sudah hampir 17 tahun bekerja sebagai pekerja musiman di bidang pengorganisasian acara, mengerjakan pekerjaan kasar saat sebuah event organizer memanggilnya. Ibu Fitriani menerima beberapa ratus ribu Rupiah dari suaminya ketika dia mendapatkan bayaran atas pekerjaannya, tetapi dia tidak pernah tahu jumlah keseluruhan suaminya dibayar dan dia tidak pernah bertanya.

Ibu Fitriani sendiri bekerja sebagai pekerja rumahan sejak awal tahun 2000. Dia memotong benang yang menjuntai atau benang ruwet dari pakaian jadi dan dibayar dengan jumlah yang sangat kecil yaitu Rp. 80 (USD 0,006 sen) per buah. Dia menerima pesanan kerjanya dalam paket, yang masing-masing berisi 10 pakaian. Dia bisa menyelesaikan 10 paket (100 buah pakaian) per hari, yang berarti dia mendapatkan Rp 8.000 per hari (USD 0,67). Jika dia bekerja 30 hari per bulan, dia bisa menghasilkan Rp. 240.000 (USD 20) pada akhir bulan; jika tidak, dia menghasilkan lebih sedikit. Selanjutnya, pekerjaan rumahan ini datang padanya hanya antara bulan Desember dan Mei tahun berikutnya, karena itu adalah periode ketika banyak perusahaan garmen mengeksport produk mereka.

Ibu Fitriani menerima pesanan kerja, mengambil pakaian dan menyerahkan pekerjaan yang selesai kepada seorang perantara yang tinggal dalam jarak beberapa langkah dari rumahnya. Dia juga tahu nama perusahaan tempat dia bekerja, tapi dia meminta nama tersebut tidak disebutkan di sini



“  
*Saya senang belajar topik-topik baru melalui kelompok ini, misalnya tentang jender, hak asasi manusia dan kualitas kerja.*  
”

karena takut akan akibatnya misalnya kehilangan pekerjaannya.

Untuk mendapatkan penghasilan lebih untuk keluarganya, Ibu Fitriani juga membuka warung (kios) di rumahnya, menjual sebagian besar bahan makanan. Kios tersebut dulunya biasa menghasilkan Rp. 300.000 per hari ketika belum banyak kios di lingkungannya. Sekarang, kios tersebut hanya menghasilkan Rp. 100.000 per hari. Ibu Fitriani juga menjual pakaian yang dibelinya dari tempat lain dan dia memperbolehkan pelanggan untuk membayar secara kredit. Pendapatan bervariasi tergantung pada apakah pelanggan membayar kredit tepat waktu atau tidak. Dengan semua pekerjaan ini dan pekerjaan suaminya, ibu Fitriani tahu bahwa pendapatan keluarga adalah di atas upah minimum regional, namun dia tidak berpartisipasi dalam program jaminan sosial pemerintah misalnya BPJS karena dia tidak tahu cara mengaksesnya. Dia juga menyekolahkan anak-anaknya di mana biayanya dibayar oleh pemerintah. Ini membantu keluarganya memiliki cukup uang untuk makan dan menabung agar anak-anaknya nanti dapat masuk ke pendidikan tinggi di masa depan.

Rekan sesama pekerja rumahan Ibu Fitriani memandang dia sebagai seorang pengusaha kecil yang cukup berhasil dan, dengan demikian, mempercayai dia untuk menjadi ketua kelompok mereka, "Perempuan Mandiri". Kelompok ini memiliki 32 anggota dan terlibat dengan kegiatan pemberdayaan perempuan sejak tahun 2010, yang

difasilitasi oleh Yasanti. Yasanti adalah sebuah LSM lokal yang bekerja di DI.Yogyakarta dan Jawa Tengah dan sejak tahun 2014 menjadi salah satu Mitra Pelaksana Proyek MAMPU ILO - Akses ke Ketenagakerjaan dan Pekerjaan Layak untuk Perempuan yang didanai oleh Pemerintah Australia.

Sejak Yasanti menjadi Mitra Pelaksana Proyek ILO/MAMPU, kata Ibu Fitriani, **"Saya telah berpartisipasi dalam pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, pelatihan jender dan terlibat dalam pengembangan modul pendidikan untuk pekerja rumahan. Saya juga berpartisipasi dalam pertemuan bulanan, di mana kami membicarakan masalah kami sebagai pekerja rumahan dan berupaya menemukan solusi."** Ibu Fitriani lebih lanjut mengungkapkan bahwa dia telah belajar banyak tentang masalah pekerja rumahan melalui Yasanti. Dengan sedikit ragu, dia berkata,

**"Saya ingin pekerja rumahan diakui sebagai pekerja. Saya ingin hak kami sebagai pekerja diakui dan saya ingin kontrak tertulis antara kami dan pemberi kerja kami."**

Ketika ditanya mengapa dia ragu, Ibu Fitriani menjelaskan bahwa dia takut pemberi kerja mereka akan berhenti memberi mereka pekerjaan jika mereka terlalu vokal. Tetapi ditanya apakah dia akan terus terlibat dalam masalah pekerja rumahan, dia dengan tegas mengatakan, **"Oh, pasti."** Kita perlu lebih banyak perempuan pemberani seperti Ibu Fitriani dan kita perlu menyuarkan hak-haknya sebagai pekerja rumahan. 🌸

Didokumentasikan oleh  
Hirania Wiryasti

Proyek ILO-MAMPU  
Ungaran, Kab. Semarang, Jawa Tengah,  
Desember 2014





# Juliani: **“Melangkah maju adalah prinsip hidup saya saat ini”**

*Sebuah kisah dari Deli Serdang, Sumatera Utara*

September 2014 akan menjadi bulan monumental yang tak terlupakan bagi Juliani, seorang pekerja rumahan berusia 31 tahun dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Untuk pertama kalinya, dia dan beberapa pekerja rumahan lainnya memiliki keberanian untuk menuntut kenaikan upah. Juga, para pekerja rumahan ini mulai bekerja bersama untuk memperbaiki kondisi kerja mereka.



Juliani sekarang menjadi perempuan yang berbeda. Tiga bulan yang lalu, dia bahkan tidak tahu bahwa apa yang telah dia kerjakan selama delapan tahun dari

rumah dianggap sebagai pekerjaan yang disebut pekerjaan rumahan. Istilah pekerja rumahan digunakan untuk mengacu pada pekerja-luar industri yang mengerjakan pekerjaan berbayar dari rumah mereka, untuk perusahaan/bisnis atau perantara mereka, biasanya secara satuan. Karena pekerjaan rumahan dikerjakan di dalam rumah, dan seringkali terpisah dari pekerja lain dan masyarakat setempat, pekerjaan rumahan cenderung tidak terlihat oleh mata publik meskipun memberikan kontribusi terhadap perekonomian.

**“**  
*Menerapkan apa yang telah saya pelajari dari pelatihan, saya meminta mereka untuk mempertimbangkan tuntutan kami karena kami belum pernah meminta kenaikan upah.*

**”**

Juliani menjahit kursi bayi dari rumahnya untuk sebuah perusahaan di dekatnya, mendapatkan 7.000 rupiah per lusin. Perusahaan menyediakan bahan yang diperlukan (kain, busa dan kain renda), dan selain mesin jahit, dia mempersiapkan peralatannya sendiri misalnya jarum, benang dan gunting.

Rata-rata, dia bisa menjahit hingga tujuh lusin per hari, mendapatkan penghasilan bulanan berkisar antara Rp. 400.000 hingga Rp. 1,5 juta tergantung pesanan. Penghasilannya menjadi tambahan yang signifikan untuk pendapatan rumah tangganya digabung dengan suaminya. Suaminya, Sudiono, bekerja sebagai buruh bangunan dan mendapatkan Rp. 600.000 hingga Rp. 2 juta per bulan.

***“Saya sebelumnya tidak pernah memiliki keberanian untuk berbicara dengan pemberi kerja saya tentang masalah saya. Tetapi saya merasa memiliki lebih banyak pengetahuan dan***

**keberanian sekarang, berkat pelatihan yang saya terima dari Bitra”** serunya.

Bitra, sebuah organisasi masyarakat sipil, merupakan salah satu Mitra Pelaksana Proyek ILO/MAMPU – Akses ke Ketenagakerjaan dan Pekerjaan Layak untuk Perempuan yang didanai oleh Pemerintah Australia. Aya Matsuura, Kepala Penasihat Teknis Proyek ILO-MAMPU, mengatakan bahwa pekerja rumahan yang sebagian besar adalah perempuan sangatlah rentan karena mereka kurang memiliki perlindungan hukum yang memadai dan bekerja terisolasi dengan daya tawar yang lemah. Mereka dipekerjakan melalui pengaturan informal tanpa kontrak tertulis, dan seringkali mendapatkan upah di bawah upah minimum, jam kerja yang sangat panjang, dan tidak memiliki jaminan kerja. Penggunaan peralatan dan bahan tertentu yang mungkin berbahaya dapat membuat tidak hanya sang pekerja, tetapi juga anggota keluarga termasuk anak-anak terkena berbagai resiko keselamatan dan kesehatan.

Setelah bergabung dengan organisasi tersebut, Juliani aktif berpartisipasi dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Bitra. Dia belajar tentang, antara lain, hak-haknya sebagai pekerja, hukum perburuhan yang relevan, kesetaraan jender, perlindungan sosial dan bagaimana berkomunikasi dan berunding dengan lebih baik. **“Pada awalnya, saya sangat kewalahan dan takut kehilangan pekerjaan saya, jadi saya bahkan berpikir untuk meninggalkan organisasi. Tetapi mentor saya meyakinkan saya untuk tidak keluar dan terus meningkatkan diri.”** Dengan lebih banyak pengetahuan tentang hak-hak mereka sebagai

pekerja, Juliani dan rekan-rekan kerjanya merasa percaya diri untuk mendekati pemberi kerja mereka, menuntut kenaikan upah. **“Para kolektor sebagai perwakilan perusahaan merasa kesal dengan tuntutan kami. Mereka tidak mau membicarakannya,”** kata Juliani.

Namun, dia tidak mau menyerah. Dia kemudian secara pribadi berbicara dengan kolektor lagi dengan cara yang wajar, menjelaskan bahwa kenaikan upah yang dituntut adalah untuk menutup peningkatan biaya transportasi dan bahan. **“Menerapkan apa yang telah saya pelajari dari pelatihan, saya meminta mereka untuk mempertimbangkan tuntutan kami karena kami belum pernah meminta kenaikan upah,”** imbuhnya. Pada akhirnya, keberaniannya membuahkan hasil. Dia diberitahu bahwa perusahaan akan menaikkan besaran upah menjadi 8.000 rupiah per lusin, bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk seluruh anggota kelompoknya. **“Kami semua sangat gembira dengan kabar baik ini.”**

Juliani sekarang menjadi perempuan yang telah berubah. Dia terinspirasi untuk menjadi seorang perempuan yang kuat, cerdas dan berani. Dia juga menetapkan tujuan pribadi untuk terus memperkuat keahliannya, mendapatkan pendapatan yang lebih baik dan memperbaiki kondisi kerjanya. Dia bahkan berbicara dengan suaminya tentang kesetaraan dan bagaimana dia menghargai kontribusi suaminya pada pekerjaan rumahan tersebut dan kontribusinya terhadap perekonomian rumah tangga mereka. **“Melangkah ke depan adalah prinsip hidup saya saat ini,”** kata Juliani. 🌸

Didokumentasikan oleh  
Novita Hendrina

Proyek ILO-MAMPU  
Deli Serdang, Sumatera Utara,  
Oktober 2014



# Bekerja sebagai pekerja rumahan dan tiga pekerjaan lain untuk mendukung keluarga

*Sebuah kisah dari Malang, Jawa Timur*

Uswatun Hasanah, 42 tahun, bekerja tiga hingga empat pekerjaan pada satu waktu. Dia membuka warung di depan rumahnya, menjual mie ayam dan bensin untuk sepeda motor; bekerja sebagai penjahit, menerima pesanan dari tetangga dan pelanggan; bekerja sebagai pekerja rumahan, menjahit bordir yang nantinya akan dijahitkan ke sepatu; dan menyediakan layanan katering berdasar permintaan, biasanya selama liburan hari raya. Suaminya bekerja sebagai sopir truk, tetapi hanya bekerja bila ada barang untuk dikirimkan. Ibu Hasanah, suaminya dan dua anak perempuan mereka berusia 17 dan 13 tahun tinggal di sebuah rumah sederhana di desa Kedung Rejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

Dari total lima pekerjaan yang dikerjakan oleh Ibu Hasanah dan suaminya, pendapatan keluarga adalah sekitar Rp. 1.500.000 per bulan. Ini di bawah upah minimum kabupaten sebesar Rp. 1.635.000 dan hampir tidak cukup untuk menghidupi keluarga mereka. Kedua putrinya bersekolah, namun kebutuhan primer lainnya harus dikesampingkan. Keluarga tidak berpartisipasi dalam program jaminan sosial apapun, termasuk BJPS Kesehatan, skema jaminan kesehatan perubahan dari pemerintah. Biaya keanggotaan minimal Rp. 25.000/bulan/orang lebih baik digunakan untuk makan dan sekolah, kata Ibu Hasanah ketika ditanya mengapa dia tidak mengikuti BPJS.



Bekerja sebagai pekerja rumahan, Ibu Hasanah menyelesaikan 20-30 pasang bordir dalam satu bulan. Pemberi kerjanya akan mengirimkan benang pada awal setiap bulan dan mengambil pekerjaan yang telah selesai pada akhir setiap bulan. Dengan upah Rp. 8,000 (75 sen) per pasang, dia akan dibayar Rp. 160,000-240,000 pada saat penyerahan.

Jika sepasang yang diserahkan tidak memenuhi standar yang diminta, dia harus mengganti dengan yang baru tanpa benang tambahan yang disediakan. Ibu Hasanah dan para perempuan lain yang mengerjakan pekerjaan yang sama tidak pernah diberi pelatihan apapun oleh pemberi kerja mereka. Mereka, dari awal, diharapkan sudah memiliki keterampilan di bidang bordir.

Ibu Hasanah adalah anggota kelompok pekerja rumahan yang diorganisir oleh Mitra Wanita Pekerja Rumahan Indonesia (MWPRI), sebuah LSM lokal yang mengorganisir pekerja rumahan perempuan di Jawa Timur dan merupakan salah satu Mitra Pelaksana Proyek ILO/MAMPU – Akses ke Ketenagakerjaan dan Pekerjaan Layak untuk Perempuan yang didanai oleh Pemerintah Australia.

Dia telah bekerja sebagai pekerja rumahan di industri garmen selama 8 tahun. Dalam 6 tahun pertama, dia membuat bordir untuk kerudung Muslim dan dibayar Rp. 12.000 (USD 1,1) per buah. Sayangnya, pekerjaan ini dihentikan oleh pemberi kerja. Sejak tahun 2012, dia membuat bordir untuk sepatu dengan upah yang lebih rendah. Pada tahun ke-1, dia dibayar



Rp. 6,000 (USD 55 sen) per pasang. Memasuki tahun ke-2, Ibu Hasanah berunding dengan pemberi kerjanya tentang upah yang lebih tinggi. **“Sayalah orang yang meminta kenaikan upah, dari Rp. 6.000 menjadi Rp. 10.000, menjelaskan bahwa harga-harga secara umum telah naik dan saya sudah bekerja selama beberapa tahun. Pada awalnya dia (pemberi kerja) mengatakan tidak, tapi kemudian kami berdiskusi. Dia akhirnya setuju untuk menaikkan upah menjadi Rp. 8.000 (USD 72.7 sen) per pasang ... Saya melakukan ini sendiri. Saya tahu saya berani.”** Ibu Hasanah cukup berani untuk melakukan hal ini dengan dorongan dan dukungan dari MWPRI, dari mana dia tahu bahwa perundingan dimungkinkan bila disertai dengan pembenaran dan penjelasan.

Selain menyetujui kenaikan upah, pemberi kerjanya juga bersedia meminjamkan kepada Ibu Hasanah Rp. 2 juta (US\$ 200) sebagai modal awal untuk warungnya, tanpa bunga dan batas waktu, tapi selama dia tetap bekerja pekerjaan bordir. Ide membuka usaha kecil datang kepadanya setelah berpartisipasi dalam kursus kewirausahaan yang diselenggarakan oleh MWPRI. **“Uang dari membuat bordir tidak cukup (untuk menghidupi**



**keluarga saya), jadi saya harus melakukan sesuatu yang lain. Saya berpartisipasi dalam kelas kewirausahaan MWPRI dan berpikir bahwa saya bisa menjual sesuatu. Saya beruntung bahwa pemberi kerja saya adalah orang yang baik. Saya mengajukan pinjaman kepadanya dan dia bersedia memberikannya kepada saya. Sekarang, saya menjual mie ayam dan bensin. Memang, saya tidak mendapatkan banyak penghasilan dari warung, tetapi uang yang didapatkan dari warung ini digunakan untuk memberi uang saku anak-anak saya.”** Ibu Hasanah mungkin memang beruntung memiliki pemberi kerja yang akomodatif dan memahami, sebuah kondisi langka di kalangan pekerja rumahan.

Ibu Hasanah adalah seorang perempuan dengan banyak tujuan dan upaya terus-menerus. Dia berharap bisa memasukkan anak sulungnya ke sebuah universitas di Jakarta di mana biayanya gratis, tetapi biaya hidupnya mahal. Dia juga ingin membuat dan menjual sepatu sendiri di masa depan, bukan hanya memasok bordir. Dalam proses ini, Ibu Hasanah akan tetap terlibat aktif dalam kegiatan pengorganisasian dan pengembangan kapasitas yang diselenggarakan oleh MWPRI. 🌸

Didokumentasikan oleh  
Hirania Wiryasti

Proyek ILO-MAMPU  
Malang, Jawa Timur,  
September 2014

